



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

RENCANA KERJA TAHUN 2024

**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN FLORES TIMUR
Jln. Ile Napo : Telp / Fax [0383] 2551234
LARANTUKA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan yang Mahakuasa karena atas penyertaan dan penyelenggaraan ilahi-Nya, kami dapat menyelesaikan dan menyajikan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

Dokumen Perencanaan Pembangunan tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan acuan dan pedoman dalam pembuatan dan penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dalam periode Rencana pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Sehingga diharapkan dokumen Renja Dinas Tenaga Kerja dapat berpedoman dan sesuai dengan tema RKPD tahun 2024 ini yaitu percepatan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan, Produktivitas.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini belum sempurna adanya. Untuk itu, kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaannya di tahun anggaran selanjutnya. Kami pun menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang dengan caranya telah membantu kami dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini.

Larantuka, Juli 2023
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Flores Timur,

Drs. Ramon Mandiri Piran
Pemerintah Muda /IV c
NIP. 196705011993031014

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	7
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	8
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	9
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	10
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	11
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	12
	3.3. Program dan Kegiatan	14
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	15
BAB V	PENUTUP	16

Daftar Tabel lampiran

Tabel	Uraian	Hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun lalu Dinas Tenaga Kerja Kab. Flores Timur	
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kab. Flores Timur	
Tabel T2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja kab. Flores Timur	
Tabel .2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kab. Flores Timur	
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kab. Flores Timur	



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD, yang memuat Program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD Tahun 2024.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. BAB V : Penutup
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun RKA PD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2024.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPPD.
- (3) Kepala BPPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2024 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2024.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 17 Juli 2023

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 17 Juli 2023

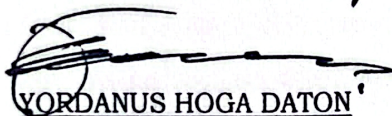
**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,**

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007

BAB I

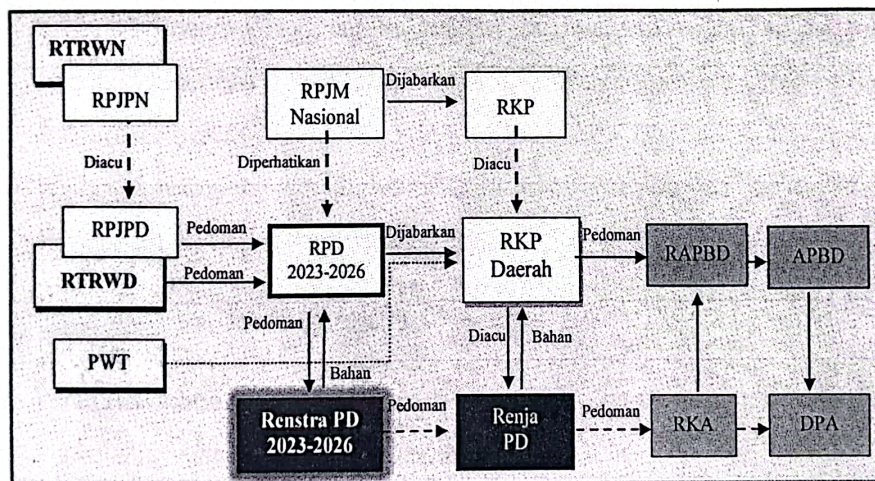
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan, *stakeholder* lain dan masyarakat. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra). Dokumen-dokumen ini menjadi salah satu acuan dalam menyusun rencana kerja organisasi perangkat daerah.

Rencana kerja tahunan organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Gambar 1.1 Hubungan antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Dalam penyusunan Renja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana Kerja OPD berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program/kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Begitu pula Renja Dinas Tenaga Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Tenaga Kerja dan dalam penyusunannya mengacu pada RKPD. Renja Dinas Tenaga Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKA-OPD (Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah) yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan DPA-OPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran- Organisasi Perangkat Daerah).

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Dalam penyusunan Renja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana Kerja OPD berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program/kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Begitu pula Renja Dinas Tenaga Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Tenaga Kerja dan dalam penyusunannya mengacu pada RKPD. Renja Dinas Tenaga Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKA-OPD (Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah) yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan DPA-OPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran- Organisasi Perangkat Daerah).

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
20. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur;
21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2023-2026
22. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor : 11 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan penjabaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Sedangkan tujuannya penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 adalah :

- a. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD serta memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

- b. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Tenaga Kerja
- c. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2024
- d. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan pengendalian serta evaluasi kinerja tahunan Dinas Tenaga Kerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Meliputi: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU meliputi: Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra , Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH meliputi: Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V PENUTUP berisikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaan dan ketersediaan anggaran, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan sebuah organisasi yang akuntabel perlu dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi untuk menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitasnya dengan melakukan klarifikasi atas *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai. Uraian tentang hasil evaluasi rencana kerja tahun lalu dapat dilihat pada rincian table 2.1 di bawah ini :

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat *pada lampiran Tabel T 2. 1* Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renja Perangkat Daerah.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi /Kab/Kota

A. Berdasarkan Renstra Tahun 2017-2022

No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1	Pertirisan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun n-3	Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
						DINAS TENAGA KERJA						77.7			
	x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						98.6			
						Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)						100			
						Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)						0			
						- Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)						100			
						Presentase Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)						100			
	x	xx	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		80				100			
	x	xx	01	2.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renja, RKA, DPA, DPAP, LAKIP, Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan) (dokumen)	25	20	7	7	1			
	x	xx	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100				100			
	x	xx	01	2.0	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (kali)	14	14	14	14	1			
	x	xx	01	2.0	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya pelayanan jasa administrasi keuangan (bulan)	60	12	12	12	1			
	x	xx	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100				100			
	x	xx	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor (paket)	25	8	4	4	1			
	x	xx	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (unit)	37	9	0	0	0			
							Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (unit)	29	11	2	0	0			
	x	xx	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor (jenis)	124	21	23	23	1			

No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun n-3	Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							<i>Tersedianya A lat Tulis Kantor (jenis)</i>	226	41	25	25	1				
	x	xx	01	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	<i>Tersedianya barang cetakan dan pengandaan (lembar, buku)</i>	251500	132364	50300	50300	1				
	x	xx	01	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan (jenis)</i>	12	1	1	1	1				
	x	xx	01	2.0	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Tersedianya makanan dan minuman (OK) (dos)</i>	7000	2060	250	250	1				
	x	xx	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar dan kedalam daerah (kali)</i>	315	187	24	24	1				
	x	xx	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</i>	100				100				
	x	xx	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (kali)</i>	60	12	12	12	1				
	x	xx	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Bulan pelayanan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)</i>	60	12	12	12	1				
	x	xx	01	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)</i>	100	20	20	17	0.85				
	x	xx	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100								
	x	xx	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Tersedianya pelayanan jasa perijinan kendaraan dinas / operasional (unit)</i>	8	1	1	1	1				
							<i>Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional (unit)</i>	71	5	5	5	1				
	x	xx	01	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Terawatnya gedung kantor (gedung)</i>	2	2	2	2	1				
	x	xx	01	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah a sarana dan prasarana Gedung/ Kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara (unit)</i>	45	13	32	32	1				
	x	xx	01	2.0	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung / Kantor (unit)</i>	108	26	13	13	1				
	2	07				Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja										
	2	07	03			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi (Orang)</i>	767	134	10	10	100				
	2	07	03	2.0	1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		767	134	10	10	1				
	2	07	03	2.0	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Bimtek dan Kelompok yang didampingi (orang, kelompok)</i>	767	134	10	10	1				
	2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	<i>Persentase Penyerapan Tenaga kerja (%)</i>			12.5	12.5	100				

No	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program (restra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2					Perkiraan Realisasi -sesuai Target Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun n-3	Target Ranja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi Ranja Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Ranja Perangkat Daerah Tahun n-1	Realisasi -sesuai Program dan Kegiatan s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
	2	07	04	2.0	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	100				100			
	2	07	04	2.0	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Daerah (dokumen)	4	1	1	1	1			
	2	07	04	2.0	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (orang)→Seminasi	4016	457	436	436	1			
						Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (orang)→Pembukaan Jalan Baru	6104	2438	0	0	0			
	2	07	05		Program Hubungan Industrial	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)			56	56	100			
	2	07	05	2.0	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan		100							
	2	07	05	2.0	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan (perusahaan)	144	39	20	20	1			
						- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Survey KHL; Pembinaan UMP, THR, Perbaikan Syarat Kerja; Pembinaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh; Pembinaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan) (Pasar / Perusahaan / Serikat Pekerja)	0	0	10	10	1			
	2	07	05	2.0	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian kasus Perselisihan hubungan Industrial (kasus)	50	74	15	15	1			
	2	07	05	2.0	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah Dokumen UMP,THR dan Data KHL (dokumen)	244	11	6	6	1			
	3	32			Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi									
	3	32	03		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kelompok dalam UPT yang diberdayakan (kelompok)			3	3	100			
	3	32	03	2.0	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		500	0	1	0	0			
	3	32	03	2.0	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah sarana dan Prasarana Sosial dan Ekonomi yang dibangun. (Unit)	500	0	1	0	0			

No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun n-3	Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	3	32	03	2.0	05	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah Sosialisasi Peraturan Hukum Ketransmigrasian (orang kali)	2870	400	500	0	0			
	3	32	04			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Wilayah Transmigrasi Baru	3322	21	18	18	1			
	3	32	04	2.0	1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	3322	21	18	18	1			
	3	32	04	2.0	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah bantuan untuk warga transmigrasi lokal (paket)	3322	21	18	18	1			

B. Berdasarkan Renstra Tahun 2023-2026

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(9)	10	11
							K	K	K	K
2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan					
2-7	3-32	0-0	01		DINAS TENAGA KERJA					69.45
2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		100	100	100
						Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		100	100	100
						Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		60	0	0
						Presentase Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)		100	100	100
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	16	12	12	75
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	8	2	2	25
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	8	2	2	25
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	20	6	6	30
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	4	4	50
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	12	1	1	12
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	60	12	12	20

2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	4			0
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	4	1	1	25
2	07	01	2.02	04	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokmen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD (Dokumen)	4			
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	8	2	2	25
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	100	100	100	100
2	07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	6	6	6
2	07	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD (dok)	3			3
2	07	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan milik daerah pada SKPD (Laporan)	18			18
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)				
2	07	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4	1	1	4
2	07	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	16	4	4	16
2	07	01	2.05	09	Pendidikandan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	2			
2	07	01	2.05		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah orang yang melakukan bimbingan teknis implemementasi peraturan perundangan-undangan	2			
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	100	100	100

2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	12	3	3	12
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)	10	4	4	10
2	07	01	2.06	03	Penyediaan peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga (paket)	4	1	1	4
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan (Paket)	5	2	2	5
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	8	2	2	8
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	1	1	4
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	48	12	12	48
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48	12	12	48
2	07	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan (Unit)		35	35	
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (unit)	45	15	15	45
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	5	4	4	5
2	07	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1	1	1	1
2	07	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	11	3	3	11
2	07	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	12	11	11	12
2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		100	100	
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	48	12	12	48
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	48	12	12	48
2	07	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	1	1	4

2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	48	12	12	48
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)		100.000	100.000	
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya (Unit)	3	3	3	3
2	07	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	58	15	15	58
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	2	2	2	2
2	07	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset tak berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara (Unit)	1	1	1	1
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	2	2	2	2
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	33	11	11	33
2	07	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	5	1	1	5
2	07				Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					
2	07	03			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)	2.93	2.86	2.86	97.61
						Persentase pemenuhan sarana pelatihan BLK (%)		0	0	0
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	95	30	30	95
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	95	30	30	31.6
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Voikasi dan Produktivitas pada tahun (Lembaga)	20	4	4	20.0
2	07	03	2.02	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten / Kota	jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja (unit)	120			0.0
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	Jumlah lembaga pelatihan swasta yang dibina (lembaga)		5	5	

2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	48	12	12	48
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		100.000	100.000	
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dihayarkan Pakainya (Unit)	3	3	3	3
2	07	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	58	15	15	58
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	2	2	2	2
2	07	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset tak berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara (Unit)	1	1	1	1
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	2	2	2	2
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	33	11	11	33
2	07	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	5	1	1	5
2	07				Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					
2	07	03			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)	2.93	2.86	2.86	97.61
						Persentase pemenuhan sarana pelatihan BLK (%)		0	0	0
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	95	30	30	95
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	95	30	30	31.6
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/koordinasi dalam rangka Optimilisasi Kapasitas Instruktur dan peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Voikasi dan Produktivitas pada tahun (Lembaga)	20	4	4	20.0
2	07	03	2.02	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten / Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja (unit)	120			0.0
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	Jumlah lembaga pelatihan swasta yang dibina (lembaga)		5	5	

2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	Jumlah lembaga pelatihan swasta yang dibina (lembaga)	15	5	5	15
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	49%	47.2	47.2	96.33
2	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Derah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL (Orang)	100	100	100	100
2	07	04	2.01	01	penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	1			1
2	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL (Orang)	400	100	100	400
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (orang)	400	100	100	400
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	115	30	30	115
2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja dalam 1 tahun di kab/kota				
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	11	5	5	11
2	07	04	2.03		Pengelola Informasi Pasar Kerja					
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi Informasi Pasar Kerja online (Dokumen)	4	1	1	4
2	07	04	2.04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kab/Kota	Tersedianya Perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) di daerah Kab/Kota				
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI	Jumlah CPMI /PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya (orang)	800	250	250	800
02	07	04	2.04	02	Penyediaan layanan Terpadu pada calon pekerja migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani (Orang)	2100	525	525	2100
02	07	04	2.04	03	Pemberdayaan pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan (Orang)	80	20	20	80
2	07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase Perkara Perselisihan yang ditangani (%)		80	80	100

2	07	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKB untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam dsatu daerah Kab/Kota	Tersedianya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah kab/kota		10	10	
2	07	05	2.01	01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terdaftar dengan Hub WKLP online (Perusahaan)	30	10	10	30
2	07	05	2.01	02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerjasama(Perusahaan)	30	10	10	30
2	07	05	2.01	03 Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana hubungan industrial (PP/PKB) struktur sakala upah dan LKS biparti) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta penunahan (lanoran)	30	10	10	30
2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan	Jumlah perselisihan yang dapat dicegah dan dselesaikan		15	15	
2	07	05	2.02	01 Pencegahan Perselisihan Hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah (Perkara)	65	20	20	65
2	07	05	2.02	02 Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial .mogok kerja, dsan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan satu daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara Perselisihan yang terselesaikan(Perkara)	60	10	10	60
2	07	05	2.02	03 Penyelenggaraan Verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi, dan konfederasi serikat nekerja/serikat buruh/serta non afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi (asosiasi dan Serikat Pekerja)	6	6	6	6
2	07	05	2.02	05 Pengembangan Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekeria(Orane)	60	100	100	60
3	32			Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi					
3	32	02		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Identifikasi potensi kawasan transmigrasi (Dokumen)	2	2	2	100
3	32	02	2.01	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan Transmigrasi (kawasan)		4	4	
3	32	02	2.01	01 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	8	2	2	8

3	32	02	2.01	02	Advokasi dan Musyawarah penetapan kawasan transmigrasi	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi)	4	4	4	4
3	32	02	2.01	03	Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi	Luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi (Hektar)	604	2 UPT (604 Hektar)	2 UPT (604 Hektar)	604
3	32	03			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran pada UPT yang dibangun (%)	2	2	2	20
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk	Tersedianya jumlah penataan persebaran penduduk		2	2	
3	32	03	2.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan jumlah pemukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang) (Dokumen)	1	1	1	1
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah calon Transmigran yang mendapatkan penyuluhan (Kepala Keluarga)	750	250	250	750
3	32	04			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang dikembangkan (%)		50	50	50
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Pemukiman pada tahap kemandirian	Tersedianya jumlah pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian (Satuan Pemukiman)				
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina (Kepala Keluarga)	200	50	50	200
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan (satuan pemukiman)	4	2	2	4

Disusun

..... tanggal

KEPALA Perangkat Daerah

KAB/KOTA

(

)

dibandingkan kegiatan program/kegiatan dengan target Renstra Pada Tahun 2022 maka pada program penempatan tenaga kerja melalui sistem padat karya melebihi target pada Renja OPD tahun 2022 karena adanya penambahan pagu sebagai akibat kompensasi kenaikan Bahan bakar Minyak Tahun 2022.

- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

Belum ada kegiatan yang memerlukan kebijakan karena masih dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk kasus pada Hubungan Industrial penyelesaian kasus beberapa kasus dapat diselesaikan/dimediasi sebagai fasilitator pada pihak pemberi dan penerima pekerjaan di Kantor Dinas Tenaga kerja, walaupun tidak efektif tapi bisa diselesaikan dengan baik sesuai target penyelesaian kasus.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Uraian ini dapat dilihat *pada lampiran tabel .2.2*

Terlihat pada tabel bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 sudah mencapai target yang ditetapkan dalam perubahan renja Tahun 2022 akan tetapi bila dibandingkan dengan target capaian renstra 2017-2022 terlihat sangat rendah pencapaiannya untuk urusan ketenagakerjaan dan urusan transmigrasi Pada Tahun 2023 apabila dilihat dari pencapaian semester I ini sudah mencapai target untuk semester I ,akan tetapi karena pembandingnya dengan realisasi capaian kinerja yang akan dicapai tahun berjalan. Proyeksi untuk tahun depan juga dengan mempertimbangkan bahwa besaran pagu dan kondisi pemerintahan yang stabil maka realisasi dapat lebih tinggi dari tahun sebelumnya, sehingga dibutuhkan keseriusan dan kerjasama antar sector dan kerjasama dalam lingkup OPD sendiri untuk bisa menjalankan dan melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan kualitas.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Flores Timur

No	Indikator	SPM/Standar	IKK	target Renstra perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		catatan analisis
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
Urusan Ketenagakerjaan												
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja Per tahun		V	10 10	16 10	20 15	20 15	22 15	8 9	20 15	20 15	angka sengketa pertahun meningkat setiap tahunnya karena semakin terbukanya lapangan pekerjaan yang membutuhkan suatu upaya pencegahan dan penyelesaian setiap kasus dalam pemberi dan penerima pekerjaan
2	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)		V	10 10	10 10	20 13	20 13	21 11	8 9	20 13	20 13	Meningkatnya jumlah angka sengketa antara pengusaha dan penerima kerja maka dengan penyelesaian oleh mediator penyelesaian dengan upaya perjanjian bersama juga meningkat
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan thn 2024 akab 45 + 15		V	49 100	100 100	100 100	100 100	151 60	24 29	100 100	100 100	selama masa renstra tingkat pengangguran juga tinggi sehingga dibutuhkan upaya peningkatan penempatan tenaga kerja secara prosedural sesuai dengan program nasional
4	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek		V	2544 1500	2544 1550	1500 1650	1600 1750	1248 1308	1248 1841	1500 1500	1600 1500	meningkatnya jumlah penerima kerja sebaiknya diikuti dengan kepesertaan jamsostek sehingga memberikan perlindungan dan keamanan bagi penerima kerja
5	Perselisihan Buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah		V	0	0	0	0	0	0	0	0	masa renstra dan kebijakan tentang pekerja dan pemberi kerja dari pemda selalu mengacu dari pusat sehingga hal ini tidak terjadi
6	Besaran tenaga yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi		V	60 30	30 25	25 20	30 20	10 30	30 46	25 40	30 50	kegiatan ini dari tahun sebelumnya tidak terlaksana tapi pada tahun lalu sudah mulai dilaksanakan dengan dukungan dana tetapi dukungan dana belum maksimal mencapai target yang ditetapkan sehingga masih dibawah standar realisasi targetnya.
7	Besaran tenaga yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat			0	0	0	0	0	0	0	0	Pelatihan ini tidak ada dalam masa renstra ini
8	Besaran tenaga yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan			0	0	0	0	0	0	0	0	Pelatihan ini tidak ada dalam masa renstra ini
Urusan ketransmigrasian												
1	Persentase Transmigran swakarsa			0,44	0,48	0	0	0	0	0	0	Kegiatan ini tidak terlaksana karena tidak ada dalam kepmen no.

→ thn 2023: 100
2024: 50
2025: 100
2026: 100

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan tugas, fungsi dan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur, dan telaahan terhadap Renstra Kementerian Ketenagakerjaan dan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Renstra Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT maka ditentukan isu strategis yang dirumuskan menjadi beberapa factor penghambat dan factor pendukung

1. Rendahnya Daya saing SDM ketenagakerjaan.
2. Belum adanya BLK dan belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana BLK , serta minimnya kualitas dan kuantitas instruktur dan SDM Pengelola pelatihan.
3. Perlindungan terhadap hak tenaga kerja, termasuk belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh mediator Hubungan industrial
4. Belum maksimalnya pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi lokal.
5. Ketersediaan Sarana Prasarana yang lengkap dan sesuai standar yang dapat mendukung kinerja (Gedung kantor, peralatan dan perlengkapan kantor)
6. Kawasan Translok yang penguasaannya masih ditanah ulayat dan terbatasnya pengalokasian anggaran untuk urusan transmigrasi.

Beberapa factor pendukung diantaranya :

1. Kerjasama lintas sector terkait masalah ketenagakerjaan dalam dan luar negeri serta urusan ketransmigrasian.
2. Adanya MOU dengan perusahaan dan stakeholder lainnya terkait kerjasama dibidang pelatihan dan penempatan.
3. Makin luasnya jejaring informasi pasar kerja dengan berbagai pihak yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja
4. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan TKI, PMI
5. Adanya perusahaan yang legal yang bias memfasilitasi tenaga kerja
6. Adanya peraturan tentang urusan ketransmigrasian .

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja 2024 apabila didukung oleh SDM dan SDA yang berkualitas maka diharapkan mampu untuk menekan jumlah tingkat pengangguran setiap tahunnya sehingga salah satu tujuan dari pembangunan di kabupaten Flores Timur dapat dicapai.

2.4. Review Terhadap Rancangan Renja

Rumusan Pada bagian ini menjelaskan bahwa pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada *lampiran tabel 2.3 dibawah ini* :

Berdasarkan tabel terlihat hasil analisis kebutuhan lebih besar dibandingkan dengan Rancangan awal RKPD salah satu diantaranya karena adanya penambahan target dan volume yang akan dicapai seperti dalam hal pelatihan produktivitas tenaga kerja berdasarkan kompetensi, dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Untuk kegiatan perluasan kesempatan kerja juga mengalami penambahan volume dari yang diusulkan awal dengan berbagai pertimbangan bahwa penyerapan tenaga kerja dengan melihat target yang ingin dicapai.

TABEL 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur

Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5		3	10	11	
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				2,751,297,484				3,035,197,484	Penyesuaian terhadap kebutuhan dan target serta analisa kenaikan biaya tahun berikut
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				2,290,047,484				2,425,947,484	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2,290,047,484		Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2,425,947,484	
		Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		
		Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100			Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		
		Presentase Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan	100			Presentase Perencanaan dan pelaporan capaian	100		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11 dok	115,000,000			11 dok	145,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2 dok	35,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2 dokumen	55,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	2 dokumen	25,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	2 dokumen	35,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	5 laporan	30,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	5 laporan	30,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 lap	25,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 lap	25,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	100	1,506,247,484	OPD/Larantuka	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	100	1,546,247,484	

URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp-)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5		3	10	11	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD/Larantuka	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	20 org/14bulan	1,426,247,484	OPD/Larantuka	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	20 org/14 bulan	1,426,247,484	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN(dok)	1 dok	55,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN(dok)	1 dok	55,000,000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	0	-	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	1 dok	35,000,000	
koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 dok	15,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 dok	15,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 lap	10,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	15,000,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	1	15,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	6 dokumen	22,000,000	
Penyusunan perencanaan Kebutuhan barang Milik daerah SKPD (dokumen)	OPD/Larantuka	Jumlah Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	1 dok	4,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 dokumen	10,000,000	
Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	6 lap	11,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	6 lap	12000000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	1 dok	15,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	1 dok	15,000,000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dok	15,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	15,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100.0	187,500,000	OPD/Larantuka	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	paket	224,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OPD/Larantuka	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	3 paket	8,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	3 paket	8,000,000	

URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5		3	10	11	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD/Larantuka	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)	2 paket	11,500,000	OPD/Larantuka	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)	2 paket	25,000,000	
Penyediaan peralatan Rumah tangga	OPD/Larantuka	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 pkt	5,000,000	OPD/Larantuka	Tersedianya peralatan rumah tangga	2 paket	10,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OPD/Larantuka	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan	1 pkt	20,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan	1 pkt	25,000,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	OPD/Larantuka	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	2 pkt	25,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	2 pkt	25,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 dok	1,000,000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(laporan)	12 laporan	30,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(laporan)	12 laporan	30,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 laporan	87,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 laporan	100,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	OPD/Larantuka			120,100,000	OPD/Larantuka			133,000,000	
Pengadaan Mebeleur	OPD/Larantuka	Tersedianya mebeleur yang diadakan (unit)	20 unit	50,000,000	OPD/Larantuka	Tersedianya mebeleur yang diadakan (unit)	20 unit	50,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD/Larantuka	Tersedianya Jumlah peralatan dan mesin lainnya (unit)	1 unit	6,000,000	OPD/Larantuka	Tersedianya Jumlah peralatan dan mesin lainnya (unit)	2 unit	15,000,000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya(unit)	4 unit	59,100,000	OPD/Larantuka	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya(unit)	4 unit	60,000,000	
Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya(unit)	1 unit	5,000,000	OPD/Larantuka	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya(unit)	2 unit	8,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OPD/Larantuka	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	192,200,000	OPD/Larantuka	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	192,200,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD/Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12 laporan	5,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12 laporan	5,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)	12 laporan	15,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)	12 laporan	15,000,000	
penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD/Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (laporan)	1 laporan	9,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (laporan)	1 laporan	9,000,000	

URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5		3	10	11	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 laporan	163,200,000	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 laporan	163,200,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OPD/Larantuka	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100.000	139,000,000	OPD/Larantuka	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)	100	149,500,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OPD/Larantuka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	73,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	85,000,000	
Pemeliharaan Mebel	OPD/Larantuka	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	20,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	18,000,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(unit)	2	10,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(unit)	2	5,500,000	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak berwujud Yang dipelihara	1	15,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah Aset Tak berwujud yang dipelihara	1	10,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)	2	8,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)	2	15,000,000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5	8,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	7	7,000,000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	2	5,000,000	OPD/Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	1	8,000,000	
URUSAN KETENAGAKERJAAN				336,250,000				404,250,000	
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Produktivitas Tenaga Kerja				125,000,000				128,000,000	
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi				125,000,000				128,000,000	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Larantuka, seluruh Kecamatan , Kec. Ilemandiri, kel.sarotari tengah, kel.pohon sirih, kec. Adonara timur	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	25	115,000,000	Larantuka, seluruh Kecamatan	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	20	120,000,000	

URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5		3	10	11	
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Larantuka	Jumlah Kesepakatan/koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan	5	10,000,000	Larantuka	Jumlah Kesepakatan/koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas	5	8,000,000	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJAA				141,250,000				195,250,000	
Pelayanan Antar Kerja di Derah kab/Kota				112,000,000				153,250,000	
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	kab. Flotim	Jumlah SDM pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan pelatihan melalui Bimtek dan Lain-lain untuk	1	10,000,000	Kab. Flotim	Jumlah SDM pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan pelatihan	0		
Pelayanan Antar Kerja	kab. Flotim	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	100	6,000,000	Kab. Flotim	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	100	7,000,000	
Penyuluhan dan Bimbingan jabatan Bagi Pencari Kerja	Larantuka	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100	6,000,000	Kab. Flotim	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan jabatan	100	7,000,000	
Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Flotim, kec. Solor barat, kec. Ileboleng, kec. Klubagolit, kec. Adonara, kec. wotanulumado	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	25	90,000,000	Kab. Flotim, kec. Solor barat, kec. Ileboleng, kec.	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program	30	139,250,000	
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				2,000,000				2,000,000	
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	kab. flotim	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	2	2,000,000	kab. flotim	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan Pengendalian Sesuai	2	2,000,000	
Pengelola Informasi Pasar Kerja				2,250,000				1,000,000	
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	kab. Flotim	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi Informasi Pasar Kerja online	1	2,250,000	kab. Flotim;NTT	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi Informasi Pasar Kerja online	1	1,000,000	
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kab/Kota		Tersedianya Perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) di daerah Kab/Kota		25,000,000		Tersedianya Perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) di daerah		39,000,000	
Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI	Kab. Flotim	Jumlah CPMI /PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	200	8,000,000	Kab. Flotim	Jumlah CPMI /PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	200	12,000,000	
Penyediaan layanan Terpadu pada calon pekerja migran	Kab. Flotim	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI	200	8,000,000	Kab. Flotim	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur	525	12,000,000	
Pemberdayaan pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Flotim	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	15	9,000,000	Kab. Flotim	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	20	15,000,000	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				70,000,000				81,000,000	

URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5		3	10	11	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKB untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam dsatu daerah Kab/Kota				10,000,000				15,000,000	
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Kab.Flötím	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terdaftar dengan Hub WKLP online	10	10,000,000	Kab.Flötím	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terdaftar dengan Hub WKLP online	10	15,000,000	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah kab/kota				60,000,000				66,000,000	
Pencegahan Perselisihan Hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kab/Kota	Kab.Flötím	Jumlah Perselisihan yang dicegah	20	25,000,000	Kab.Flötím	Jumlah Perselisihan yang dicegah	15	21,000,000	
Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial .mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan satu daerah kab/Kota	Kab.Flötím	Jumlah perkara Perselisihan yang terselesaikan	10	20,000,000	Kab.Flötím	Jumlah perkara Perselisihan yang terselesaikan	20	25,000,000	
Penyelenggaraan Verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha,federasi, dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh/serta non afiliasi	Kab.Flötím	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi (asosiasi dan Serikat Perikat)	6	10,000,000	Kab.Flötím	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi (asosiasi dan Serikat Perikat)	6	10,000,000	
Pengembangan Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Kab.Flötím	Tertlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	50	5,000,000	Kab.Flötím	Tertlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	100	10,000,000	
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi				125,000,000				205,000,000	
Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi				25,000,000				75,000,000	
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kec. Tanjung Bunga (waibao)dan kec. Demon Pagong (lewokluok)	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dok)	2	25,000,000	Kec. Tanjung Bunga dan kec. Demon Pagong	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dok)	2	75,000,000	
Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian				100,000,000				130,000,000	
Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman	Desa Narasaosina (UPT Purinara),Desa Adabang (UPT tanameana)	Jumlah KK Transmigran yang dibina (KK)	50	10,000,000	Desa watanpao ,Libu dan adabang	Jumlah KK Transmigran yang dibina (KK)	50	30,000,000	

URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2		3	4	5		3	10	11	
Penguatan insfrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Desa Adabang (UPT Tanameang), Desa Bloto (UPT Watanpao)	Jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan (satuan pemukiman)	2	90,000,000	Desa Purinara	Jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan (satuan pemukiman)	2	100,000,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan pemanngku kepentingan disajikan dalam bentuk usulan musrembang kecamatan tiap tahunnya yang direkap oleh OPD dan juga melalui aspirasi masyarakat atau pokir. Usulan masyarakat yang dipilah juga disesuaikan dengan kelogisan usulan dan keseuaian dengan program kegiatan. Uraian dapat dilihat pada table lampiran 2.4. Usulan Yang diusulkan oleh masyarakat tidak sepenuhnya dapat diterima ada banyak aspek kesesuaian yang perlu mendapat perhatian dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, besaran anggaran yang akan direalisasikan serta kesesuaian dengan usulan yang ada dilapangan. Usulan pada tahun 2024 terlihat pada program pelatihan kerja dn produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.

Tabel 2.4
Usulan Program Dan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2024
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1.	2		4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-		
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi (Orang)		
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Bimtek dan Kelompok yang didampingi (Orang, Kelompok)	30 orang (tersebar di beberapa kecamatan)	Usulan Kecamatan/Desa/Kelurahan antara lain : Desa Lewolukok Kec. Demon Pagong; Desa Mokantarak Kec. Iarantuka; Desa Horowara Kec. Adonara Tengah ; Desa Lewohala Kec. Ilemandiri; Kel. Amangarapati Kec. Iarantuka ; Desa Balaweling Kec. Witihama; Desa Kolaka Kec. tanjung Bunga; Desa Sinamalaka Kec. tanjung Bunga; Desa Bandona Kec. tanjung Bunga ;Desa mennaga Kec. solor Timur; Kel. sarotani tengah Kc. Larantuka ; Dusun I,II,III Desa Lelenbaala kec. adonara Timur; Dsea Dawataa Kec. Adonara Timur ; Desa Lewopao kec. Ilebolog ; Desa Tapobali Kec. adonara timur; Dusun I,II,III DEsa Bilal Kec. Adonara Timur; Desa Buyuntaa kec. Ilebolog , DEsa Tanawahang Kec. Titehena; Desa Adabang Kec. titehena; Desa Sulangwaseng Kec. Solor Barat; Desa Bubutagamu kec. Solor Selatan;Desa Tuakepa Kec. Titehena; Desa Lemanu Kec. Solor Selatan;Desa Balaweling Kec. Solor Barat; Desa tanahlein Kec. Solor Barat ;Desa NimunDanibao Kec. Adonara Barat; Desa gayak Kec. Ilebolog; Desa Tiwatobi Kec. ilemandiri;Desa Blepanawa kec. Demon Pagong; Kel. Lewolere Kec. Larantuka.

Berdasarkan tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 di atas, semua usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah dirangkum dari hasil musyawarah rencana pembangunan di kecamatan tahun 2023. Ada usulan yang diterima dan ada usulan yang ditolak. Usulan yang diterima disesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada pada masing masing program/kegiatan/sub kegiatan dan pertimbangan ketersediaan anggaran serta skala prioritas.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RKP Tahun 2024 memuat prioritas dan kebijakan pembangunan nasional. Sebagai RKP tahun terakhir dalam pelaksanaan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RKP 2024 mengusung tema “ *Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan* ” dan fokus pada penyelesaian target target pembangunan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 tersebut, maka Pembangunan Nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi :

- a. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan pendidikan
- c. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
- d. Penguatan Daya Saing Usaha
- e. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
- f. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
- g. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
- h. Pelaksanaan Pemilu 2024

Penjelasan tentang arah kebijakan pemilu 2024, dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan RKP tahun 2024, yakni :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5 %
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0%**
- c. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,7%
- d. Rasio Gini dengan nilai sebesar 0,374 - 0,377
- e. Indeks pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai sebesar 73,99 - 74,02
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RRK) sebesar 27,27 %.

Apabila Dilihat dari Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran maka Indikator Dinas Tenaga kerja sesuai dengan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, selanjutnya untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui prioritas pembangunan Tahun 2024 yakni; diantaranya adalah : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dimana manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata diseluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, belanja negara Tahun 2024 diarahkan salah satunya dalam jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM.

Sebagai satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional, kebijakan nasional beserta target kinerja tersebut harus mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergi dan terintegrasi. Dengan demikian, komunikasi, koordinasi dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah harus terus diperahankan untuk menjaga momentum pembangunan. Konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah akan tercapai jika dijematani oleh sinergitas pusat daerah oleh berbagai pemangku kepentingan.

Dinas Tenaga Kerja dengan berbagai program dan kegiatan dapat mendukung arah kebijakan nasional melalui peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan kerja yang diharapkan mampu menekan tingkat pengangguran, begitu pula dengan program kegiatan pada urusan transmigrasi diharapkan dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar translok maka membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja tahun 2023-2026 sebagaimana terlihat pada tabel 3.2 berikut:

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2021	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya daya saing	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,81	3,56	3,31	3,00	2,85	

3.3. Program dan Kegiatan

Pada ulasan ini dapat dilihat pada tabel 3.3.

Jumlah Program Pada Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja membiayai 2 urusan yaitu urusan ketenagakerjaan dan urusan ketrasmigrasian. Untuk Program sebanyak 6 program ; Jumlah kegiatan 17 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Lokasi kegiatan yang berhubungan dengan program hubungan industrial maka menyebar di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Flores Timur, sedangkan untuk pelatihan produktivitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja maka disesuaikan dengan besaran pagu dan usulan yang masuk yang telah dipertimbangkan. Untuk Urusan ketrasmigrasian pada Tahun 2024 difokuskan pada Desa Waibao dan Desa Lawoklouk untuk pemukiman transmigrasi lokal, selain pembinaan dan pemberdayaan pada 4 UPT Transmigrasi lokal sebelumnya.

Adapun uraian selengkapnya dapat dilihat pada lampiran tabel 3.3.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			lokasi	Target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu Indikatif	sumber dana		Target capaian kinerja	kebutuhan dana/pagu Indikatif
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	07	0-0	02		Dinas Tenaga Kerja				266,250,000	DAU			323,250,000
2	07	01			Urusan Ketenagakerjaan				266,250,000				323,250,000
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				266,250,000				323,250,000
2	07	03			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)			125,000,000				128,000,000
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi				125,000,000				128,000,000
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Kab. Flores Timur	25	115,000,000			20	120,000,000
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Voikast dan Produktivitas pada tahun n	Kab. Flores Timur	5	10,000,000			5	8,000,000
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)			141,250,000				195,250,000
2	07	04	2.01		pelayanan Antar Kerja di Derah kab/Kota	Tersedianya Jumlah pelayanan antar kerja di daerah kab/kota	Kab. Flores Timur		112,000,000				153,250,000
2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber daya pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM pelayanan antar kerja yyang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain lain untuk peningkatan kompetensi	Kab. Flores Timur	1	10,000,000			0	-
2	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	Kab. Flores Timur	100	6,000,000			100	7,000,000
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	Kab. Flores Timur	100	6,000,000			100	7,000,000
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Flores Timur	25	90,000,000			30	139,250,000
2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang memiliki izin dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Flores Timur		2,000,000				2,000,000
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan A turan yang Berlaku	Kab. Flores Timur	2	2,000,000			2	2,000,000
2	07	04	2.03		Pengelola Informasi Pasar Kerja	Tersedianya informasi pasar kerja	Kab. Flores Timur		2,250,000				1,000,000
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi Informasi Pasar Kerja online	Kab. Flores Timur	2	2,250,000			1	1,000,000
2	07	04	2.04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kab/Kota	Tersedianya Perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) di daerah Kab/Kota	Kab. Flores Timur		25,000,000				39,000,000

2	07	04	2.04	01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI	Jumlah CPMI /PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Kab. Flores Timur	200	8,000,000			200	12,000,000
02	07	04	2.04	02	Penyediaan layanan Terpadu pada calon pekerja migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	Kab. Flores Timur	200	8,000,000			525	12,000,000
02	07	04	2.04	03	Pemberdayaan pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	Kab. Flores Timur	15	9,000,000			20	15,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah, maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III dan dirumuskan per program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan perangkat daerah tahun 2024, sebagai berikut : Uraian ini dapat dilihat pada lampiran tabel 4.1

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024
STATUS TERVERIFIKASI**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)				
								NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.344.116.760,00										2.462.446.597,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			2.344.116.760,00										2.462.446.597,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah KABUPATEN/KOTA			1.983.816.760,00							Penunjang Prioritas			2.224.446.597,00	DINAS TENAGA KERJA
			Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100.000												
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	75.000												
			Persentase ASN yang Memiliki Keesuksesan Kompetensi (%)	25.700												
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100.000												
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000.000,00							Penunjang Prioritas			140.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.00	15.000.000,00			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Penunjang Prioritas	RENJA MURNI DAN PERUBAHAN	2.00	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2.00	10.000.000,00			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Penunjang Prioritas	RENJA MURNI DAN PERUBAHAN DOKUMEN RKA /DPA MURNI DAN PERUBAHAN	2.00	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.00	10.000.000,00			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Penunjang Prioritas	DOKUMEN RKA /DPA MURNI DAN PERUBAHAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA	5.00	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.00	15.000.000,00			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Penunjang Prioritas	LAPORAN CAPAIAN KINERJA EVALUASI KINERJA	2.00	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.568.998.832,00							Penunjang Prioritas	EVALUASI KINERJA		1.481.247.484,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	1.501.198.832,00			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Penunjang Prioritas	EVALUASI KINERJA ASN	20	1.429.247.484,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.00	57.800.000,00			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Penunjang Prioritas	ASN SOMINISTRASI TUGAS ASN	1.00	55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.00	10.000.000,00			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Penunjang Prioritas	SOMINISTRASI TUGAS ASN LAPORAN KEUANGAN	2.00	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			Penunjang Prioritas	LAPORAN KEUANGAN		11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6.00	5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	LAPORAN KEUANGAN REKON DAN LAPORAN BARANG	5.00	11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.000.000,00			Penunjang Prioritas	REKON DAN LAPORAN BARANG		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.00	5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	REKON DAN LAPORAN BARANG PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	1.00	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			117.120.118,00			Penunjang Prioritas	PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN		213.498.573,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.00	2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN INSTALASI LISTRIK	3.00	3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.00	10.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	INSTALASI LISTRIK PERALATAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.00	20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.00	5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	PERALATAN PERLENGKAPAN KANTOR PERALATAN RUMAH TANGGA	1.00	5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.00	20.900.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	PERALATAN RUMAH TANGGA BAHAN LOGISTIK KANTOR	1.00	22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.00	15.920.118,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	BAHAN LOGISTIK KANTOR CETAK DAN PENGANDAAN	2.00	25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.00	1.300.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	CETAK DAN PENGANDAAN BAHAN BACAAN	1.00	1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12.00	12.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	BAHAN BACAAN KUNJUNGAN TAMU	12.00	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12.00	50.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	KUNJUNGAN TAMU RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	12.00	107.498.573,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			35.000.000,00			Penunjang Prioritas	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20.00	10.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI MEBEL	15.00	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.00	10.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	MEBEL PERALATAN DAN MESIN LAINNYA (INFOKUS DAN AC)	0.00		DINAS TENAGA KERJA

2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.00	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	PERALATAN DAN MESIN LAINNYA (INFOKUS DAN AG) GORDEN	1.00	20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.00	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	GORDEN KANOPI(SARANA PRASARANA GEDUNG LAINNYA)	0.00		DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			118.500.000,00		Penunjang Prioritas	KANOPI(SARANA PRASARANA GEDUNG LAINNYA)		193.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12.00	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	KANOPI(SARANA PRASARANA GEDUNG LAINNYA) JASA SURAT MENYURAT	12.00	5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	JASA SURAT MENYURAT PERANGKAT DAERAH	12.00	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.00	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH	1.00	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH	12.00	193.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			86.000.000,00		Penunjang Prioritas	PERANGKAT DAERAH		120.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.00	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH	3.00	86.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.00	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH	2.00	9.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.00	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH	2.00	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.00	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH	7.00	7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.00	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH	1.00	8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			215.500.000,00		Sumber Daya Manusia			128.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	10.00	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PEKERJA MIGRAN	PERUSAHAAN	10	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			68.500.000,00			PERUSAHAAN		68.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		20.00	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERUSAHAAN		21.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)		20.000.000,00			TENAGA KERJA	15	25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	10.00	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TENAGA KERJA	20	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	5.00	16.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ORGANISASI PENGUSAHA	5.00	7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	50.00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	100		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			117.800.000,00					145.000.000,00	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			117.800.000,00					145.000.000,00	
1.3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Dokumen Identifikasi potensi kawasan transmigrasi (Dokumen)	1.000	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			40.000.000,00		Penunjang Prioritas	JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Semakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	2.00	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KAWASAN TRANSMIGRASI	2.00	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang dikembangkan (%)	50.000	77.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	KAWASAN TRANSMIGRASI		130.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian			77.800.000,00		Penunjang Prioritas	KAWASAN TRANSMIGRASI		130.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	50.00	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas	KAWASAN TRANSMIGRASI SATUAN PEMUKIMAN	50	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kemandirian dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Pemukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan		67.800.000,00		Penunjang Prioritas	SATUAN PEMUKIMAN		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun Rencana 2024 disusun dengan berpedoman kepada RPJMN, RPJP Provinsi, RKPD Provinsi, RPJMPD Kabupaten, RPD Kabupaten, RKPD Kabupaten Flores Timur, Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026. Renja tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 memperhatikan Kaidah-Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut :

1. Memperhatikan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tahun lalu
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
3. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai
4. Memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat Perangkat Daerah, sebagai wujud nyata dan tanggungjawab Pemerintah dalam membangun daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 memuat arah kebijakan Pembangunan dan berisikan Komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan. Dokumen RKPD yang disusun memperhatikan kaidah kaidah perencanaan, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

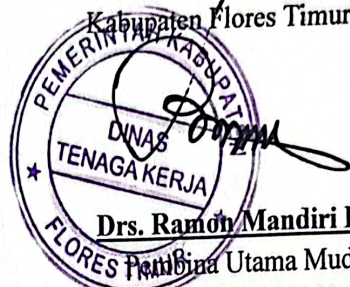
Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah , masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Untuk itu, dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan Kesehatan yang tertuang dalam Renja Tahun 2024 untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas.

Rencana kerja Tahun 2024 ini dijadikan sebagai dasar bagi perangkat daerah dalam penyusunan RKA Tahun 2024 menuju ke APBD untuk pelaksanaan Renja. Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 ini disusun sesuai ketentuan berdasarkan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2024.

Larantuka, Juli 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Flores Timur,



Drs. Ramon Mandiri Piran
Pembina Utama Muda
Nip. 196705011993031014